DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**

KATA PENGANTAR **2**

BAB 1 PENDAHULUAN **3**

1.1. LATAR BELAKANG 3
1.2. LANDASAN HUKUM 4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA **9**

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN 12
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN 13
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 15

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN **23**

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 28
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN 28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 31

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **42**

BAB 5 PENUTUP **44**

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Yang Maha Merencanakan dan Maha Pencipta kami mengawali perencanaan tahunan agar dapat menjadi keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'alaa atas rahmat dan hidayah Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan tahun 2026 dapat dituntaskan. Hal ini penting mengingat dokumen renja ini menjadi terminal yang menghubungkan rencana strategis perangkat daerah dengan rencana kerja anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 52 Tahun 2021. Renja disusun berdasarkan rencana strategis yang telah dituangkan di dalam Renstra Dinas tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target- target Indikator Kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran DPKPP Kabupaten Nunukan tahun 2026.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sejak Tahun 2022 untuk memastikan terpenuhinya papan dengan lingkungan yang layak sebagai kebutuhan primer masyarakat serta menertibkan administrasi pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, perlu merumuskan perencanaan yang terarah untuk mencapai target yang ditentukan setiap tahun dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disinergikan dengan dokumen Renstra periode 5 tahun.

Sebagai dokumen, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan disusun dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum /lintas bidang;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta rincian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Nunukan setiap tahun anggaran sesuai kebijakan Perangkat Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.

Disamping Peraturan–peraturan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan juga senantiasa memperhatikan

Undang – undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang–undang yang ada.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

   1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
   2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
   3) penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN LALU

Bab ini memuat :

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Karya Kabupaten Nunukan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN

Bab ini memuat :

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

B. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;

C. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN

BAB V. PENUTUP

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2022 dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2022 melakukan evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja Tujuan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA PD) Sampai Dengan Tahun Berjalan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI %	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1....	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.04...	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1.04.02..	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**	**100 Persen**		**35 Persen**			**35 Persen**		**77,8 %**
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	20 Unit	0 Unit	7 Dokumen	20 Unit	100,00 %	0 Unit	100,00 %	66,92 %
1.04.02.2.02.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	jumlah kk yang mengikuti sosialisasi untuk rumah bagi korban bencana atau relokasi	20 Unit	0 Unit	20 Unit	20 Unit	100,00 %	0 Unit	100,00 %	85,06 %
1.04.02.2.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Penerima Manfaat yang terfasilitasi Kebutuhan Hunia Rumah	0 Unit	0 Unit	25 Unit	25 Unit	100,00 %	0 Unit	0,00 %	97,26 %
		Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	0 unit	0 unit	25 unit	25 unit	100,00 %	0 Unit	0,00 %	99,00 %
1.04.03..	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni**	**6,09 %**		**8,88 %**			**8,17%**		**1,32 %**
1.04.03.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman									
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	2 Kawasan	0 Kawasan	2 Kawasan	0 Kawasan	0,00 %	1 Kawasan	0,00 %	0,00 %
1.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00 %	1 Dokumen	0,00 %	56,83 %
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	0,00 %	81,81 %
1.04.05..	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**									
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi							
1.04.05.2.01.07	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0 Lokasi							
2....	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI %	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
2.10...	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
2.10.04..	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**									
2.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	16,67 %	15,52 %
2.10.09..	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase pelayanan izin terbit**	**100 Persen**		**35 Persen**			**35 Persen**		
2.10.09.2.01.	Penerbitan Izin Membuka Tanah									
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	20,00 %	32,29 %
X.XX.01..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**			**100 Persen**		**11,61 %**
X.XX.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	100,00 %	12,30 %
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	100,00 %	2,64 %
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	16,67 %	11,57 %
X.XX.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 org/bln	0 org/bln	336 org/bln	336 org/bln	100,00 %	336 org/bln	0,00 %	12,80 %
X.XX.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	100,00 %	12,65 %
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	16,67 %	13,95 %
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	50,00 %	15,35 %
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	16,67 %	12,17 %
X.XX.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %	3 Laporan	16,67 %	15,12 %
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %	2 Laporan	16,67 %	10,66 %
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00 %	2 Unit	16,67 %	13,78 %
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100,00 %	2 unit	16,67 %	6,74 %
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	16,67 %	14,26 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data BPS dalam Nunukan dalam Angka, kawasan permukiman Kabupaten Nunukan seluas 17,21 Km^2 atau 1.721 Ha. Sebagian yang menjadi kewenangan DPKPP, yaitu pada kawasan kumuh. Untuk peningkatan kawasan permukiman diperlukan tahapan dengan capaian periodik yang terukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Persentase luas kawasan pemukiman kumuh, dengan definisi operasional Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani melalui Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni. Capaian untuk indikator tersebut hingga tahun 2026 sebesar 35% sesuai dengan target. Hal ini dicapai melalui kolaborasi dengan provinsi dan satker kementerian pekerjaan umum.

Program yang terkait dengan SPM yaitu Program Pengembangan Perumahan. Kaitan program ini untuk mencapai 2 indikator SPM, yaitu : 1. Penyediaan rumah yang layak bagi korban bencana; 2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi korban program relokasi pemerintah. Kinerja ini dicapai dengan melaksanakan pendataan, menyusun kebutuhan hingga pelaksanaan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pendataan untuk warga korban bencana sebanyak 40 KK yang dapat dibantu melalui rehab rumah maupun pembangunan. Sementara penyediaan rumah relokasi tidak dilaksanakan terkait tidak adanya rumah terdampak program untuk di relokasi atau kebutuhan rumah untuk di relokasi.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan menjadi hal yang penting menjadi bagian pengamanan aset Pemerintah Daerah. Program ini berhasil mencapai 32,98 % sesuai target, sehingga tingkat capaian menjadi 100%. Hal ini karena kasus sengketa yang berhasil difasilitasi sebanyak 5 kasus.

Sementara untuk Program Izin Lokasi tidak dapat dilaksanakan karena kewenangannya telah dialihkan ke instansi lain. Program Izin membuka tanah pada tahun 2022 masih bersifat koordinasi dan konsultasi. Pelayanan belum

bisa dilaksanakan terkait belum ditetapkannya peraturan Kepala Daerah mengenai hal tersebut. Namun telah dirumuskan draft peraturan terkait yang menjadi bahan acuan untuk pembentukan. Dokumen yang telah dibuat berupa laporan pelaksanaan kegiatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasinya yakni (1) Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah khusus dan rumah layak huni bagi korban bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (3) Persentase tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan dan (4) Jumlah kasus sengketa/ konflik pertanahan yang diselesaikan. Sampai akhir Tahun 2021 capaian ketiga indikator kinerja tersebut sudah tercapai sesuai target. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih Banyak kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/305/V/2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nunukan meliputi 11 (sebelas) lokasi di 5 (lima) kecamatan dengan luas total 170,37 Ha (seratus tujuh puluh koma tiga puluh tujuh hektar). Dan Laporan Luas kawasan permukiman kumuh pada tahun 2022 berkurang hingga 151,99 Ha.
2. Belum tersedianya rencana induk penanganan permukiman dan permukiman kumuh.
3. Penyediaan Hunian Yang Layak Huni melalui Kemitraan;

4. Belum optimalnya penanganan perumahan pasca bencana disebabkan belum jelasnya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pembangunan dan rehab rumah korban bencana.
5. Belum lengkapnya basis data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid, terkini (*up-to-date*) dan terintegrasi.
6. Kebijakan terkait kegiatan Izin lokasi yang tidak dapat terlaksana seiring perubahan peraturan tentang kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Belum optimalnya pelayanan informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Belum dapat dilaksanakannya Izin membuka Tanah terkait belum diterbitkannya peraturan kepala daerah terkait. Sehingga pelaksanaan masih bersifat koordinatif.
9. Pembentukan dinas pada awal tahun anggaran 2022 menjadi hambatan tersendiri sehingga perlu mengeksploitasi SDM yang tersedia.

Dalam mengatasi isu-isu penting dan permasalahan di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan telah melaksanakan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan OPD yang menangani sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di kabupaten/ kota serta dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR, melalui Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Selain melalui kegiatan Rakor dan Forum OPD tersebut, koordinasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan.
2. Keterbatasan bantuan pemerintah maupun CSR untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat tidak mampu.
3. Masih banyak masyarakat tinggal di daerah yang rawan bencana atau bahkan tinggal di daerah yang bukan diperuntukkan untuk permukiman, seperti kawasan permukiman wilayah pesisir dan wilayah daerah aliran sungai yang rawan terkena bencana banjir;

4. Terbatasnya jumlah SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan yang tidak sebanding dengan pelaksanaan program/kegiatan dan pengolahan data sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Meskipun beberapa permasalahan dan hambatan di atas masih muncul, namun tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, usulan Pemerintah Desa/ Kecamatan, OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	7,52 Persen	1.732.446.300	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	7,52 Persen	2.146.693.083	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman	1 Kawasan	82.450.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman	1 Kawasan	83.171.250	
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	0 Dokumen	0	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	82.450.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	83.171.250	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha		Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	1 Kawasan	0	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha		Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	1 Kawasan	0	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	0 Dokumen	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	1 Dokumen	1.013.728.750	
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Kawasan	650.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	0 Kawasan	0	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						20 rumah	1.013.728.750	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	70 Persen	1.330.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	70 Persen	1.199.962.380	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan rehab/pembangun baru	25 dokumen	250.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan rehab/pembangun baru	25 dokumen	99.999.090	
	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus (1.04.02.2.01.06)		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	20 dokumen	100.000.000	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus (1.04.02.2.01.06)		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	20 dokumen	99.999.090	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	5 dokumen	150.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	5 dokumen	150.000.000	
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.01)		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 unit	0	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.01)		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 unit	399.998.450	
	Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED)		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED)		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota (1.04.02.2.03.02)		atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota (1.04.02.2.03.02)		atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Pembangunan rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.04)		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	35 unit	2.010.000.000	Pembangunan rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.04)		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 unit	629.994.410	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 unit rumah	680.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 unit rumah	0	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan	15 unit rumah	1.330.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan	0 unit rumah	0	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (1.04.02.2.06.03)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	69.969.640	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (1.04.02.2.06.03)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	69.969.640	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	39 Lokasi	4.825.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	39 Lokasi	4.825.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	18 Lokasi	2.050.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	18 Lokasi	2.050.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Persentase pelayanan Izin lokasi	9,1 Persen	30.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Persentase pelayanan Izin lokasi	0 Persen	0	
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang terbit dalam 1(satu) Tahun	9,1 persen	30.000.000	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang terbit dalam 1(satu) Tahun	0 persen	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	9,1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	0 Dokumen	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase pelayanan izin terbit	70 Persen	170.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase pelayanan izin terbit	70 Persen	202.933.050	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah Izin membuka/Memanfatkan Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun	2 Dokumen	170.000.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah Izin membuka/Memanfatkan Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun	2 Dokumen	202.933.050	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	202.933.050	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase realisasi TORA	70 Persen	350.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase realisasi TORA	70 Persen	1.910.964.650	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun	102 Laporan	325.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun	0 Laporan	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100 Laporan	275.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan	2 Laporan	1.910.964.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian konflik pertanahan	36,28 Persen	200.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian konflik pertanahan	36,28 Persen	300.000.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	1 Dokumen	200.000.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	1 Dokumen	300.000.000	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	6.622.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	357.630.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	116.560.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	110.748.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	33.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	33.211.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	207.290.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	98.820.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan gaji Aparatur	2 Orang/ Bulan	4.735.970.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan gaji Aparatur	2 Orang/ Bulan	3.207.440.098	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/ Bulan	4.735.970.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/ Bulan	3.207.440.098	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Satuan Kerja yang Terlayani	4 Paket	330.480.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Satuan Kerja yang Terlayani	4 Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.970.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.234.760	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.570.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.448.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.720.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.648.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	168.220.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.115.920	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer	2 Unit	37.090.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer	2 Unit		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Unit	37.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Unit	15.110.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	960.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	834.049.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	34.440.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Laporan	925.870.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Laporan	77.276.170	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	200.670.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	36.157.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari kabupaten/kota. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Prioritas usulan masyarakat Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kecamatan	Usulan		Alamat	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sebatik Timur	LEGALITAS SURAT TANAH SD 001 SEBATIK TIMUR	1 Paket	RT.08, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Sungai Nyamuk	0 paket	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
Sebatik Timur	LEGALITAS ASET LAPANGAN BOLA SUNGAI NYAMUK	1 Paket	RT.08, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Sungai Nyamuk	0 paket	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
Sebatik Timur	Pembangunan Jalan Permukiman (Betonisasi, Paving Blok, Jerambah), Tembok Penahan Tanah, Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis	1 Paket	rt 05, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
Sebatik Timur	Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman (sd 200 KK), Pembangunan MCK Umum	1 Paket	rt 08, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
Sebatik Timur	Pembangunan Jalan Permukiman (Betonisasi, Paving Blok, Jerambah), Tembok Penahan Tanah, Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis	1 Paket	rt 09, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
Sebatik Timur	Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman (sd 200 KK), Pembangunan MCK Umum	1 Paket	rt 10, Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
Tulin Onsoi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Salang RT I dan RT II, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Salang	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Tulin Onsoi	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Paket	Desa Balatikon Lama, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Balatikon	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Tulin Onsoi	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Paket	Makmur, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Makmur	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sebatik Barat	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	rt 01 sampai rt 07 desa bambangan, Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Bambangan	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Tulin Onsoi	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Paket	RT III Desa Tau Baru, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Tau Baru	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Lumbis	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Paket	Desa Taluan Rt 1, Kab. Nunukan, Lumbis, Taluan	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Tulin Onsoi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	desa sekikilan, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Sekikilan	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sebatik Tengah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	desa sungai limau, Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Sungai Limau	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan	Usulan		Alamat	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sebatik Utara	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	RT 01 hingga Rt 12 Desa Sungai Pancang, Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Sungai Pancang	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Lumbis	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Pulu Bulawan, Kab. Nunukan, Lumbis, Pulu Bulawan	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sembakung	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Tepian, Kab. Nunukan, Sembakung, Tepian	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sembakung	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Tujung, Kab. Nunukan, Sembakung, Tujung	0 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Nunukan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Sedesa Binusan, Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Tulang, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Tulang		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Lumbis	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Sumalumung, Kab. Nunukan, Lumbis, Sumalumung		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sebatik Barat	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	desa liang bunyu, Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Liang Bunyu		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Lumbis Ogong	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 Paket	Desa Samunti Kec. Lumbis Ogong, Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Samunti	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota
Lumbis Hulu	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Paket	Desa Pa"Loo Kampung Lama Sungai Sulon Kec. Lumbis Hulu, Kab. Nunukan, Lumbis, Pa'loo	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Tulang, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Tulang	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Pulau Keras, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Pulau Keras	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Liuk Bulu, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Liuk Bulu	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Katul, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Katul	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Kecamatan	Usulan		Alamat	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sembakung Atulai	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Atap, Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Sembakung	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Atap, Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Lumbis Ogong	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 Paket	Desa ubol alung, Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Ubol Alung	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Lumbis Ogong	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Ubol Alung, Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Ubol Alung	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Lumbis	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Paket	Desa Mansalong, Kab. Nunukan, Lumbis, Mansalong	0 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Sembakung	Relokasi pemukiman penduduk akibat sering terjadi bencana banjir	1 Paket	Desa Labuk, Kab. Nunukan, Sembakung, Labuk	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
Lumbis	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Paket	Desa Taluan, Kab. Nunukan, Lumbis, Taluan	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
Lumbis	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Paket	Desa Taluan, Kab. Nunukan, Lumbis, Taluan	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
Sembakung Atulai	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Paket	Desa Binanun, Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Binanun	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
Sembakung	Perumahan warga untuk direlokasi yang baru masih kurang	1 Paket	Desa Butas Bagu, Kab. Nunukan, Sembakung, Butas Bagu	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
Tulin Onsoi	perumahan Camat dan staf untuk kecamatan Tulin Onsoi	1 Paket	Desa Sekikilan, Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Sekikilan	0 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus
Lumbis	Permohonan pembangunan rumah ibadah / gereja 1 unit	1 Paket	Desa Bulan bulan, Kab. Nunukan, Lumbis, Bulan-Bulan	0 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		

Kecamatan	Usulan		Alamat	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Sebuku	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Paket	Rt 02 Desa Melasu Baru, Kab. Nunukan, Sebuku, Melasu Baru	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sebatik Barat	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Paket	Semua RT Diwilayah Desa Binalawan, Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Binalawan	1 paket	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Nunukan Selatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1 Paket	Jl. Mangga depan Poltek Nunukan RT.05 Kelurahan Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	1 paket	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Nunukan Selatan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	1 Paket	Jalan Nangka RT.06 Kel.Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	1 paket	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan mengkaji Rencana Strategis (Renstra) Kementerian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain hal itu kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu SPM dan IKK. Hal tersebut tertuang pada Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Seluruh Program dan kegiatan telah dirumuskan untuk mencapai IKK, sementara SPM masuk dalam program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Dalam rangka menjabarkan misi dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk periode 2025-2029. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 (T-C.25) berikut ini:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPKPP Kabupaten Nunukan

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2026
						2021	2022	2023	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	t.a.d	36,00	36,00	36,00	70,00	70,00	100,00
		Meningkatkan kualitas perumahan	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	Persen	9,64	9,35	8,88	8,17	7,52	6,77	100,00
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pertanahan Yang Teratur bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya Penyelenggaran dan Pengelolaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum	Persentase pelayanan Izin lokasi	Persen	t.a.d	18,20	18,20	18,20	9,10	9,10	100,00
			Persentase pelayanan izin terbit	Persen	t.a.d	0,00	35,00	35,00	70,00	70,00	100,00
			Persentase realisasi TORA	Persen	t.a.d	0,00	35,00	35,00	70,00	70,00	100,00
		Meningkatnya penyelesaian	persentase penyelesaian	Persen	t.a.d	27,26	29,98	32,98	36,28	39,91	43,90

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2026
						2021	2022	2023	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		angka sengketa/ konflik pertanahan	konflik pertanahan								
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	t.a.d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3. Program dan Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapaianya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi Kepala Daerah **"Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera"** dengan misi "**Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi"** dituangkan pada Program Program Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Sebagai bagian dari pertimbangan perumusan program/kegiatan juga adalah IKK dan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah. Seluruh Program dan kegiatan telah dirumuskan untuk mencapai IKK. SPM yang terkait dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu : Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Program Relokasi. sementara SPM tertuang dalam program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2025-2029. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan seperti telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Bidang Pengembangan Perumahan

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

c) Bidang Kawasan Permukiman

1. Program Kawasan Permukiman

d) Bidang Pentagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi
2. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
3. Program Penatagunaan Tanah

e) Bidang Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan Tanah

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Rencana kegiatan merupakan penjabaran rinci dari rencana program. Penjabaran secara rinci terkait kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-IV.C.27) sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal			Persentase luas kawasan pemukiman kumuh	1,11	Persen	1,09	1.358.900.000	1,07	7.546.250.000	1,04	4.512.446.330	1	3.062.446.300	0,96	4.312.446.300	0,92	8.258.696.300	0,92	29.051.185.230	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	9,64	Persen	9,35	1.308.900.000	8,88	400.000.000	8,17	3.032.450.000	7,52	1.732.446.300	6,77	1.932.446.300	6,09	1.932.446.300	6,09	10.338.688.900	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	9,64	Persen	9,35	1.308.900.000	8,88	400.000.000	8,17	3.032.450.000	7,52	1.732.446.300	6,77	1.932.446.300	6,09	1.932.446.300	6,09	10.338.688.900	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman	t.a.d	Kawasan	1	0	1	100.000.000	1	882.450.000	1	82.450.000	1	82.450.000	1	82.450.000	6	1.229.800.000	
		Penyusunan dan/atau *Review* serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Te*review* serta Terlegalisasi	t.a.d	Dokumen	0	0	1	100.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	1	900.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	t.a.d	Laporan	0	0	0	0	1	82.450.000	1	82.450.000	1	82.450.000	1	82.450.000	4	329.800.000	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	t.a.d	Kawasan	1	100.000.000	1	200.000.000	1	900.000.000	1	0	1	0	1	0	6	1.200.000.000	
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	t.a.d	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	t.a.d	Dokumen	0	0	2	200.000.000	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000.000	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal**	**t.a.d**	**Kawasan**	**1**	**1.208.900.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1.250.000.000**	**1**	**650.000.000**	**1**	**850.000.000**	**1**	**850.000.000**	**6**	**4.908.900.000**	
		Penyusunan Rencana Tapak *(Site Plan)*dan *Detail Engineering Design*(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design*(DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	t.a.d	Dokumen	0	0	1	100.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	t.a.d	Unit Rumah	9,35	1.208.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,35	1.208.900.000	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	t.a.d	Kawasan	0	0	0	0	1	1.050.000.000	1	650.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	4	3.400.000.000	
	Meningkatkan kualitas perumahan		**Penyediaan dan rehabilitasi rumah khusus dan rumah layak huni bagi korban bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**t.a.d**	**persen**	**35**	**50.000.000**	**35**		**35**		**70**		**70**		100		100	**50.000.000**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**	**t.a.d**	**Persen**	**35**	**50.000.000**	**35**	**7.146.250.000**	**35**	**1.479.996.330**	**70**	**1.330.000.000**	**70**	**2.380.000.000**	100	**6.326.250.000**	100	**18.712.496.330**	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan rehab/pembangun baru**	**t.a.d**	**dokumen**	**0**	**0**	**20**	**100.000.000**	**7**	**125.000.000**	**25**	**250.000.000**	**4**	**150.000.000**	**0**	**0**	**56**	**625.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota (1.04.02.2.01.05)	jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	t.a.d	dokumen	0	0	20	100.000.000	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	40	200.000.000	
		Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus (1.04.02.2.01.06)	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	t.a.d	dokumen	0	0	0	0	7	125.000.000	5	150.000.000	4	150.000.000	0	0	16	425.000.000	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehab rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**t.a.d**	**orang**	**0**	**0**	**20**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**100.000.000**	**0**	**0**	**40**	**200.000.000**	
		Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan (1.04.02.2.02.02)	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	t.a.d	orang	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	20	100.000.000	0	0	40	200.000.000	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**t.a.d**	**unit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**1.209.996.330**	**35**	**2.010.000.000**	**49**	**3.030.000.000**	**5**	**230.000.000**	149	**6.479.996.330**	
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.01)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	t.a.d	unit rumah	0	0	0	0	40	1.109.996.330	20	680.000.000	22	740.000.000	5	230.000.000	87	2.759.996.330	
		Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota (1.04.02.2.03.02)	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	t.a.d	dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	
		Pembangunan rumah bagi korban bencana (1.04.02.2.03.04)	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	t.a.d	unit rumah	0	0	0	0	0	0	15	1.330.000.000	27	2.290.000.000	0	0	62	3.620.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	**t.a.d**	**unit**	**30**	**50.000.000**	**25**	**6.946.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**7.000.000.000**	**80**	**13.996.250.000**	
		Pembangunan rumah khusus (1.04.02.2.05.03)	jumlah rumah khusus yang dibangun	t.a.d	unit	30	50.000.000	25	6.946.250.000	0	0	0	0	0	0	25	7.000.000.000	80	13.996.250.000	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan	**t.a.d**	**laporan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**145.000.000**	**1**	**70.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**96.500.000**	**4**	**411.500.000**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	t.a.d	Dokumen	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0		30.000.000	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (1.04.02.2.06.03)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	t.a.d	Laporan	0	0	0	0	1	115.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	96.500.000	4	381.500.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang telah dilengkapi PSU		**Persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	t.a.d	**Lokasi**							**39**	4.825.000.000							
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	t.a.d	**Lokasi**							**18**	2.050.000.000							

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pertanahan Yang Teratur bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum			Persentase tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan	t.a.d	Persen		236.740.000												236.740.000	
	Meningkatnya Penyelenggaran dan Pengelolaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum		Persentase tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan	t.a.d	Persen		9.860.000												9.860.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pelayanan Izin lokasi	t.a.d	Persen	18,2	9.860.000	18,2	250.000.000	18,2	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	63,7	379.860.000	
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang terbit dalam 1(satu) Tahun	t.a.d	persen	18,2	9.860.000	18,2	250.000.000	18,2	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	100	379.860.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	t.a.d	Dokumen	18,18	9.860.000	18,2	250.000.000	18,2	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	9,1	30.000.000	100	379.860.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pelayanan izin terbit	t.a.d	Persen	0	0	35	50.000.000	35	270.000.000	70	170.000.000	70	270.000.000	100	270.000.000	100	1.030.000.000	
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin membuka/Memanfatkan Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun	t.a.d	persen	0	0	1	50.000.000	1	270.000.000	2	170.000.000	2	270.000.000	2	270.000.000	8	1.030.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	t.a.d	Dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	210.000.000	
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	t.a.d	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase realisasi TORA	t.a.d	Persen	0	0	35	500.000.000	35	500.000.000	70	350.000.000	70	500.000.000	100	500.000.000	100	2.350.000.000	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam	Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun	t.a.d	Laporan	0	0	100	500.000.000	102	475.000.000	102	325.000.000	102	475.000.000	102	475.000.000	508	2.250.000.000	
		satu Daerah Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0		0		0	
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen Laporan Koordinasi dan	t.a.d	Laporan	0	0	100	500.000.000	100	425.000.000	100	275.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	500	2.050.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Perencanaan Penggunaan Tanah	Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	t.a.d	Dokumen	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	t.a.d	Dokumen	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	**Dokumen Jumlah Pelaksanaan Rencana Penatagunaan Tanah Pasca Reklamasi**	**t.a.d**	Dokumen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**25.000.000**	**4**	**100.000.000**	
		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	t.a.d	Dokumen	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	
	Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan		**Jumlah kasus sengketa/ konflik pertanahan yang diselesaikan**	**t.a.d**	**Persen**	**27,3**	**226.880.000**	**29,98**		**32,98**		**36,28**		**39,91**		**43,9**		**43,9**	**226.880.000**	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**persentase penyelesaian konflik pertanahan**	**t.a.d**	**Persen**	**27,3**	**226.880.000**	**29,98**	**250.000.000**	**32,98**	**250.000.000**	**36,28**	**200.000.000**	**39,91**	**250.000.000**	**43,9**	**250.000.000**	**43,9**	**1.426.880.000**	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelesaian konflik pertanahan**	**t.a.d**	Dokumen	**1**	**226.880.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**1.426.880.000**	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	t.a.d	Dokumen	1	226.880.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.426.880.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		(satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	t.a.d	Berita Acara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			**Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah**	**t.a.d**	**Persen**	100	**1.561.000.000**	100		100		100		100		100		100	**1.561.000.000**	
	Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel		**Meningkatnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel**	**t.a.d**	**Persen**	100	**1.561.000.000**	100		100		100		100		100		100	**1.561.000.000**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**t.a.d**	**Persen**	100	**1.561.000.000**	100	**6.642.580.000**	100	**6.682.770.000**	100	**6.622.800.000**	100	**6.682.770.000**	100	**6.682.770.000**	100	**34.874.690.000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**t.a.d**	Dokumen	**3**	**84.290.000**	**3**	**358.700.000**	**3**	**360.870.000**	**3**	**357.630.000**	**3**	**360.870.000**	**3**	**360.870.000**	**3**	**1.883.230.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	t.a.d	Dokumen	4	27.470.000	4	116.910.000	4	117.620.000	4	116.560.000	4	117.620.000	4	117.620.000	20	613.800.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	t.a.d	Dokumen	2	7.960.000	2	33.880.000	2	34.080.000	2	33.780.000	2	34.080.000	2	34.080.000	12	177.860.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	t.a.d	Dokumen	2	48.860.000	2	207.910.000	2	209.170.000	2	207.290.000	2	209.170.000	2	209.170.000	12	1.091.570.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	t.a.d	**Orang/ Bulan**	**2**	**1.116.270.000**	**2**	**4.750.110.000**	**2**	**4.778.850.000**	**2**	**4.735.970.000**	**2**	**4.778.850.000**	**2**	**4.778.850.000**	**12**	**24.938.900.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	t.a.d	Orang/ Bulan	2	1.116.270.000	2	4.750.110.000	2	4.778.850.000	2	4.735.970.000	2	4.778.850.000	2	4.778.850.000	12	24.938.900.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**t.a.d**	**Paket**	**4**	**77.890.000**	**4**	**331.460.000**	**4**	**333.470.000**	**4**	**330.480.000**	**4**	**333.470.000**	**4**	**333.470.000**	**24**	**1.740.240.000**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	t.a.d	Paket	1	12.960.000	1	55.130.000	1	55.470.000	1	54.970.000	1	55.470.000	1	55.470.000	6	289.470.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	t.a.d	Paket	1	15.450.000	1	65.760.000	1	66.160.000	1	65.570.000	1	66.160.000	1	66.160.000	6	345.260.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	t.a.d	Paket	1	9.830.000	1	41.850.000	1	42.100.000	1	41.720.000	1	42.100.000	1	42.100.000	6	219.700.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	t.a.d	Laporan	1	39.650.000	1	168.720.000	1	169.740.000	1	168.220.000	1	169.740.000	1	169.740.000	6	885.810.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	**t.a.d**	**Unit**	**2**	**8.740.000**	**2**	**37.200.000**	**2**	**37.420.000**	**2**	**37.090.000**	**2**	**37.420.000**	**2**	**37.420.000**	**12**	**195.290.000**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	t.a.d	Unit	2	8.740.000	2	37.200.000	2	37.420.000	2	37.090.000	2	37.420.000	2	37.420.000	12	195.290.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**t.a.d**	**Laporan**	**2**	**226.350.000**	**2**	**963.170.000**	**2**	**969.000.000**	**2**	**960.310.000**	**2**	**969.000.000**	**2**	**969.000.000**	**12**	**5.056.830.000**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	t.a.d	Laporan	3	8.120.000	3	34.540.000	3	34.750.000	3	34.440.000	3	34.750.000	3	34.750.000	18	181.350.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	t.a.d	Laporan	2	218.230.000	2	928.630.000	2	934.250.000	2	925.870.000	2	934.250.000	2	934.250.000	12	4.875.480.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**t.a.d**	**Unit**	**2**	**47.300.000**	**2**	**201.270.000**	**2**	**202.490.000**	**2**	**200.670.000**	**2**	**202.490.000**	**2**	**202.490.000**	**12**	**1.056.710.000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	t.a.d	Unit	2	14.360.000	2	61.110.000	2	61.480.000	2	60.930.000	2	61.480.000	2	61.480.000	12	320.840.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir		Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2026		2026				
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	t.a.d	Unit	1	32.940.000	1	140.160.000	1	141.010.000	1	139.740.000	1	141.010.000	1	141.010.000	6	735.870.000	

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Sebagai motor dalam pembangunan daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dituntut untuk menghasilkan produk-produk pembangunan yang berkualitas. Untuk itu, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan harus selaras dengan visi dan misi Bupati Nunukan sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, melalui penyusunan rencana pembangunan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-C.28) berikut :

Tabel 4.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja DPKPP Kab Nunukan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2026
				2021	2022	2023	2024	2026	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	t.a.d	36,00	36,00	36,00	70,00	70,00	100,00
2	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	Persen	9,64	9,35	8,88	8,17	7,52	6,77	100,00

BAB 5
PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2025-2029 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan:

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan. Keberadaan Rencana Kerja (Renja) dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

4. Komitmen dan motivasi antara pemerintah melalui OPD terkait dengan stakeholder dalam melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Nunukan.

5. Pada akhirnya Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2026 merupakan arahan penyelenggaraan

infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya.

Nunukan, 21 September 2025
Kepala Dinas,

ALIMUDDIN, ST., MT.
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19700903 200212 1 008